



## Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Lokal

(Studi Kasus Program Beasiswa Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bojonegoro)

Safina Rahma Isro'in Maftukha<sup>1</sup>, Muhammad Farid Ma'ruf<sup>2\*</sup>, Galih Wahyu Pradana<sup>3</sup>,  
Deby Febrian Eprilianto<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [muhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhammadfarid@unesa.ac.id).

**Abstract.** *Human resource quality serves as a crucial pillar for national development, as it significantly influences a country's progress and competitiveness. Therefore, enhancing human resource capacity has become a strategic priority, particularly at the regional level where local governments play a vital role. The Government of Bojonegoro Regency has introduced several initiatives to support this objective, including the Ten Scholars per Village Scholarship Program, the Scientist Scholarship, and Final Project Assistance. Despite these efforts, several implementation challenges remain, such as cases of manipulated eligibility requirements among applicants, the absence of a digitized system for registration and document submission, and limited communication channels between program administrators and scholarship recipients. This research seeks to examine, explain, and evaluate the role of local government, especially the Education Office, in executing scholarship programs based on the theoretical framework of government roles as regulator, dynamizer, and facilitator. The study employs a descriptive qualitative method, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection, followed by data analysis using the Miles and Huberman model. The findings reveal that although the local government has begun implementing scholarship programs, the execution is not fully effective. Supervision during participant selection focuses mainly on administrative completeness rather than document authenticity. Furthermore, direct outreach activities are limited to certain regions, coordination with village authorities remains minimal, and digital transformation has yet to be realized due to unsuccessful collaboration with the Communication and Information Agency despite several coordination meetings.*

**Keywords:** *Digital Governance; Government Role; Higher Education; Human Resource Development; Scholarship Programs.*

**Abstrak.** Kualitas sumber daya manusia merupakan pilar penting bagi pembangunan nasional, karena secara signifikan memengaruhi kemajuan dan daya saing suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia telah menjadi prioritas strategis, khususnya di tingkat daerah di mana pemerintah daerah memainkan peran vital. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mendukung tujuan ini, termasuk Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa, Beasiswa Ilmuwan, dan Bantuan Proyek Akhir. Terlepas dari upaya-upaya ini, beberapa tantangan implementasi masih tetap ada, seperti kasus manipulasi persyaratan kelayakan di antara para pelamar, tidak adanya sistem digital untuk pendaftaran dan pengajuan dokumen, dan saluran komunikasi yang terbatas antara pengelola program dan penerima beasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menjelaskan, dan mengevaluasi peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, dalam melaksanakan program beasiswa berdasarkan kerangka teoritis peran pemerintah sebagai regulator, penggerak, dan fasilitator. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data, diikuti dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mulai menerapkan program beasiswa, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Pengawasan selama seleksi peserta lebih berfokus pada kelengkapan administratif daripada keaslian dokumen. Lebih lanjut, kegiatan penjangkauan langsung terbatas pada wilayah tertentu, koordinasi dengan pemerintah desa masih minim, dan transformasi digital belum terwujud karena kolaborasi yang tidak berhasil dengan Badan Komunikasi dan Informasi meskipun telah diadakan beberapa pertemuan koordinasi.

**Kata kunci:** Pengembangan SDM; Pendidikan Tinggi; Peran Pemerintah; Program Beasiswa; Tata Kelola Digital.

## 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sumber daya manusia merupakan pondasi utama bagi kemajuan Bangsa, karena Sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini dan revolusi industri, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan kualitas dan tatanan pembangunan yang baik pula bagi bangsa tersebut (Ding Nan, 2023). Pada era sekarang kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan untuk dapat menghadapi dan menjawab permasalahan global yang semakin rumit dan menantang. Salah satu kunci dari sumber daya manusia yang berkualitas yaitu memiliki pendidikan yang baik, karena melalui pendidikan seseorang akan mendapatkan dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendorong kompetensi pada seseorang, dan ini kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi dunia kerja serta melaksanakan kehidupan bersosial yang baik.

Ketika suatu negara memiliki kualitas pendidikan yang baik maka akan berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan pembangunan (Sari, 2022). Oleh sebab itu mengapa pendidikan tinggi sangat penting untuk pembangunan suatu daerah dan negaranya, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi bangsa, dan negara dengan memastikan pendidikan yang berkualitas kita dapat membangun generasi cerdas, berkarakter, sehat, sejahtera, dan siap menghadapi tantangan global (Ajiwasesa Harumeka, 2025). Sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan dan ditata oleh negara sejak dini mungkin. Dalam skala nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2024 capaian IPM Indonesia 75,02 dan menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yang dirilis tahun 2024 IPM Indonesia menduduki peringkat 112 dunia dari 187 negara. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan IPM harus memberikan perhatian khusus untuk mendapatkan capaian kenaikan IPM yang baik. Upaya peningkatan IPM ini dapat dilakukan dengan investasi jangka panjang yaitu dengan investasi pada bidang pendidikan.

Klasifikasi Desa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Klasifikasi Desa	
	2024	
Perkotaan		38,60
Perdesaan		21,16
Perkotaan + Perdesaan		32,00

Keterangan Data :  
 Sumber: BPS, Susenas KOR Catatan: Kelompok umur perguruan tinggi yang digunakan adalah 19-23 tahun

**Gambar 1.** APK Perguruan Tinggi Nasional Menurut Klasifikasi Tempat.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dilihat dari angka partisipasi kasar perguruan tinggi menurut klasifikasi desa, pada perkotaan menduduki posisi lebih unggul yaitu angka partisipasi kasar mencapai 38,60 partisipasi anak usia 19-23 tahun melanjutkan pendidikannya, sementara perdesaan angka partisipasi kasarnya hanya mencapai 21,16 menunjukkan perbedaan yang sangat besar dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan lebih unggul dalam bidang pendidikan karena memang di perkotaan akses dan fasilitas pendidikan juga lebih memadai, bukan merupakan rahasia lagi bahwa akses atau pendidikan antara desa dan kota tidak merata baik dari kualitas sarana prasarana atau kualitas pendidikannya itu sendiri. Rendahnya partisipasi untuk mengenyam pendidikan tinggi disebabkan karena banyak faktor seperti ekonomi, akses pendidikan, dan latar belakang keluarga (Sonia Ilie, 2021).

Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yang isinya menyatakan bahwa bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) mengatur dan membagi kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya, serta APBD yang dimiliki. Dalam ketentuan ini pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur segala urusan sesuai dengan pembagian yang telah ada, menyesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing, yang mana hal tersebut untuk kepentingan rakyat guna untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang kuat sehingga kemandirian daerah relatif tinggi. Kapasitas fiskal yang kuat memberikan kekuatan pada daerah tersebut untuk merancang serta membentuk suatu program pembangunan yang sesuai dengan daerahnya secara efektif dan berkelanjutan, karena ketika fiskal daerah tersebut sudah kuat maka tidak terlalu bergantung terhadap dana transfer pusat (Arif Setiawan P. T dkk., 2022). Dengan ini memberikan kesempatan besar bagi pemerintah daerah dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam pemberian solusi terhadap permasalahan peningkatan sumber daya manusia dengan membuat kebijakan-kebijakan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki peluang besar terhadap adanya kebijakan pembangunan yang arahnya sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjalankan perannya salah satunya dengan melaksanakan program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, Beasiswa *Scientist* dan Bantuan Tugas Akhir, guna untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bojonegoro. Program beasiswa ini tanggung jawab dan kewenangannya dipengang penuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dimulai dari pembuatan juknis pelaksanaan operasional program, membuka pendaftaran pelaksanaan seleksi dan monitoring dari program beasiswa ini, peranan pemerintah bukan hanya dari peresmian kebijakan akan tetapi juga dilihat dari pengawasan

serta evaluasi terkait dari pelaksanaan program, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan ketentuan atau kepastian dari penyelksian berkas, dari regulasi sudah ada akan tetapi pengimplementasiannya masih kurangberjalan dengan maksimal.

Dari hasil wawancara pra riset yang dilakukan peneliti, mengatakan bahwa masih banyak dijumpai penerima beasiswa lolos penyeleksian akan tetapi berkas yang dikumpulkan kurang sesuai, atau data yang digunakan untuk mendaftar beasiswa tersebut merupakan hasil rekayasa. Beberapa penelitian terdahulu juga membahas terkait dengan Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa, Beasiswa scientist dan Bantuan Tugas Akhir dengan berbagai sudut pandang seperti penelitian Refandi dan Alfian Dwi (2025) membahas tentang implementasi dari program tersebut yang mana penemuan dari penelitian ini kurang berjalan maksimal dikarenakan dalam pengoperasional atau pengumpulan berkas dan persyaratan masih menggunakan berkas fisik belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan digital.

Dari kendala dan permasalahan yang masih ditemukan tersebut, penting untuk kembali melihat peran pemerintah dalam implementasi program beasiswa tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus melihat bagaimana peran pemerintah kabupaten Bojonegoro atas terselenggaranya program beasiswa sepuluh sarjana perdesa, beasiswa scientist dan bantuan tugas akhir dalam peningkatan SDM melalui teori peran pemerintah menurut Iyas Yusuf (2014) yaitu peran pemerintah dalam pembangunanan SDM lokal melalui peran regulator, dinamisator dan fasilitator. Dalam topik penelitian yang sama banyak yang telah membahas efektivitas dari program nya, dampak serta implementasi program tersebut, dengan itu penulis meneliti terkait peran pemerintah daerah dalam meningkatkan SDM melalui program beasiswa sepuluh sarjana perdesa beasiswa scientist dan bantuan tugas akhir, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelengkap dan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Pembangunana sumber daya manusia (SDM) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan potensi individu agar mampu berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu Negara atau wilayah. Menurut Todaro & Smith (2020), pembangunan manusia bukan hanya saja mencakup peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan serta perluasan kesempatan pilihan hidupnya. Pembangunan Sumber Daya Manusia memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang layak serta produktif sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam

berbagai sektor terutama dalam hal ekonomi, sehingga pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah pondasi penting bagi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah tertentu, pemerintah daerah memegang peranan penting sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah wajib menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan regional, baik dari segi kewenangan maupun posisi. Peran ini erat kaitannya berfungsi sebagai penyediaan layanan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan perdamaian masyarakat (Dodi Ilham et al., 2023)

Selanjutnya menurut Iyas (2014) pemerintah dalam pembangunan berkaitan dengan mengarahkan masyarakat mandiri melalui pemberdayaan untuk terciptanya kemakmuran dengan mengharapkan masyarakat sejahtera tidak hanya masyarakat yang berjuang akan tetapi di dukung oleh keberadaan pemerintah. Peran optimal dan mendalam pemerintah diperlukan dalam pembangunan masyarakat yang meliputi:

- a. Pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menetapkan arah untuk harmonisasi pembangunan melalui penerbitan peraturan sebagai alat regulasi. Pemerintah memberikan pedoman dasar bagi masyarakat sebagai alat untuk mengatur berbagai kegiatan dalam implementasi pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Pemerintah sebagai dinamisator, peran pemerintah sebagai Dinamisator yaitu adalah sebagai pendorong partisipasi masyarakat ketika hambatan muncul dalam proses pembangunan untuk mendorong dan mempertahankan dinamika pembangunan regional. Pemerintah berperan dalam memberikan arahan yang efektif kepada masyarakat.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan regional. Sebagai fasilitator pemerintah berperan dalam bidang pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan, serta dibidang pendanaan untuk pengembangan SDM masyarakat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu komponen dari sistim pemerintahan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif, yang mana penelitian kualitatif peneliti sebagai arah utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi, objek, subjek dengan menggunakan pengamatan yang didukung oleh segala penemuan di lapangan serta argumen-argumen yang ada. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam yang menemukan sesuatu yang bersifat artistik, sehingga tidak baku dan akan tergantung pada tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Instrumen penelitian pada dasarnya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada sebuah penelitian, instrumen penelitian ini dibuat berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang digunakan sebagai dasar pada penelitian (Atmaja, 2020). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang diberikan untuk informan, metode wawancara yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Dalam sumber data diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan kedua sumber data tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan mendalam, observasi langsung kelapangan, dokumentasi, serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta melakukan pendokumentasian terhadap penunjang dan bahan pendukung penelitian ini (Zainuddin Iba, 2023).

Analisis data merujuk pada proses pencarian dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuan dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Saat melakukan wawancara, peneliti langsung menganalisis jawaban yang diberikan oleh responden. Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) analisis data melalui reduksi data, penyajian data dilanjutkan dengan reduksi dan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini fokus penelitian akan diarahkan untuk melihat bagaimana peran pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan sumber daya manusia, melalui program beasiswa sepuluh sarjana perdesa beasiswa scientist dan bantuan tugas akhir, dimana untuk mengkaji peran pemerintah dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan teori peran pemerintah daerah dalam pembangunan menurut Iyas Yusuf yang memiliki tiga variable yang meliputi: peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Penelitian ini

menggunakan teori Iyas Yusuf sejalan dengan tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait peran pemerintah dalam pelaksanaan program beasiswa ini.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai penanggung jawab serta pelaksana dari program Brasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* Dan bantuan Tugas Akhir. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, serta meperluas akses pendidikan tinggi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2019 tentang pendidikan tinggi yang isinya menyatakan bahwa pemerintah membuka program beasiswa untuk pendidikan tinggi yaitu beasiswa satu desa dua sarjana dan beasiswa *scientist*. Dalam upaya untuk meningkatkan keefektifitasan program beasiswa ini diterbitkan Peraturan Bupati No.15 Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati ini memiliki perubahan pada ketentuan penerima dan persyaratan-persyaratan. Selanjutnya terjadi perubahan ketiga yaitu melalui Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2021 yang mana dalam peraturan ini terdapat penambahan kategori beasiswa, yaitu beasiswa bantuan tugas akhir dan terdapat peraturan atau ketentuan tambahan untuk melengkapi dari peraturan bupati sebelumnya, dengan adanya Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2021 beasiswa ini menjadi memiliki tiga kategori beasiswa yaitu Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana, Beasiswa *Scientist* dan Beasiswa Bantuan Tugas Akhir.

Pada tahun 2023 bupati kabupaten bojonegoro kembali menerbitkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 tentang beasiswa prestasi pendidikan tinggi yang mana perubahan yang terjadi terdapat pada penambahan kuota karena melihat antusias serta pendaftar beasiswa yang semakin banyak, yang sebelumnya Beasiswa satu desa dua sarjana menjadi sepuluh sarjana perdesa, terdapat juga perubahan ketentuan serta pesyaratan penerima beasiswa. Perbub inilah yang masih digunakan sampai sekarang yang menjadi acuan ketentuan dari program beasiswa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, serta didukung oleh juknis program beasiswa yang dirumuskan oleh dinas pendidikan selaku pelaksana dari program beasiswa.

##### **Peran Regulator**

Dalam peran regulator, pemerintah daerah sebagai pembentuk kebijakan berperan untuk membuat aturan kebijakan dan landasan yang jelas terkait dengan pelaksanaan program, yang mana aturan dan landasan yang telah dibentuk untuk program beasiswa ini yang nantinya akan membawa arah terkait keberhasilan dan arah berjalannya program beasiswa. Sesuai dengan Ma'ruf (2025) mengatakan bahwa peran regulator pemerintah yaitu sebagai pengarah

dalam proses pembangunan daerah, melalui penerbitan regulasi sehingga efektivitas dalam pembangunan daerah dapat tercipta. Dalam peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai pembuat kebijakan sekaligus sebagai penyedia aturan mengenai kebijakan yang telah di buat, peran pemerintah sebagai regulator ini menjadi permulaan dari sebuah program. Bupati Bojonegoro landasan dan aturan mengenai program beasiswa ini jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Landasan atau peraturan yang melatarbelakangi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* Dan Bantuan Tugas Akhir adalah Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 Tentang beasiswa pendidikan tinggi, peraturan tersebut merupakan perubahan peraturan ke 4 mengenai beasiswa pendidikan tinggi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2023 Tentang beasiswa pendidikan tinggi, masih menjadi landasan dan aturan yang berlaku saat Perbub tersebut disahkan hingga sampai saat ini. Aturan-aturan lain yang mendukung seperti juknis tersedia dan jelas adanya sebagai pedoman dari penyelenggaraan program.



**Gambar 2.** Perbub No. 17 Tahun 2023.

Sumber: *Website* Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Tersebut merupakan Peraturan Bupati yang melandasi pelaksanaan program beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam peran regulator pemerintah daerah juga sebagai pengawas mengenai pelaksanaan program beasiswa, dalam praktik pelaksanaannya program beasiswa ini peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan aturan dibarengi sebagai pengawas atas aturan yang

dibuat. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan yang telah dibuat banyak dijumpai, seperti halnya mengenai rekayasa dalam pemenuhan berkas persyaratan seperti pembuatan Kartu Petani Mandiri dan Kartu Pedagang, selain itu juga berkas persyaratan beasiswa seperti surat aktif mahasiswa. Dengan adanya permasalahan ini siswa-siswi yang seharusnya memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa namun kesempatan tersebut disalahgunakan dengan pihak lain, yang tidak bertanggung jawab. Upaya dan tindakan yang diberikan oleh pelaksana program atau dinas pendidikan terkait dengan permasalahan ini yaitu Dinas Pendidikan hanya bisa memaksimalkan proses penyeleksian berkas, mengenai penyeleksian keaslian dan kebenaran data dinas pendidikan tidak melaksanakan penyeleksian secara mendalam.

### **Peran Dinamisator**

Menurut Josua Adrio Sihombing dkk (2024), peran dinamisator adalah dimana pemerintah dapat menggerakkan keterlibatan OPD dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan dalam melaksanakan peran dinamisator pemerintah daerah, mengenai peran pemerintah sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal, dalam Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa Scientist dan Bantuan Tugas Akhir pihak yang terlibat dari program beasiswa ini adalah Bupati beserta jajaran, BPKD dan tentunya Dinas Pendidikan sebagai pelaksana dari program beasiswa ini dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti koordinasi dan keterlibatan setiap instansi dapat berjalan dengan baik namun dalam program beasiswa ini terdapat kategori sepuluh sarjana perdesa, akan tetapi koordinasi serta keterlibatan pemerintah desa belum dioptimalkan.

Dalam peran pemerintah untuk menggerakkan keterlibatan pada program beasiswa ini pemerintah sudah melaksanakan penyebaran informasi baik melalui platform digital maupun cetak seperti halnya menurut Alfajri (2024) peran dinamisator pemerintah daerah sebagai pemberi dorongan serta motivasi masyarakat untuk ikut serta berkontribusi pada pembangunan daerah.



**Gambar 3.** Brosur Program Beasiswa Bojonegoro.

Sumber: *Website* Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

Selain itu pemerintah juga melaksanakan sosialisasi atau turun langsung mengajak siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam program beasiswa, namun pelaksanaannya belum merata atau hanya diberlakukan pada daerah tertentu, pada kategori program beasiswa sepuluh sarjana perdesa juga belum sepenuhnya kuota dapat terpenuhi, dari temuan serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti hal ini dapat terjadi karena memang dari pemerintah daerah mengenai penyebaran informasi atau ajakan pemerintah belum menyeluruh dan belum semua dapat mengetahui program beasiswa ini. Faktor lainnya karena pemuda pada desa tersebut sudah mendapatkan beasiswa dari pihak lain seperti KIP, Faktor selanjutnya merupakan faktor sumber daya manusia yang memang beberapa masih besar orientasinya untuk bekerja dibanding dengan melanjutkan pendidikan.

### Peran Fasilitator

Eprilianto (2023) mengatakan bahwa peran fasilitator pemerintah yaitu pemerintah sebagai penyedia fasilitas dalam menunjang pelaksanaan program, serta mendukung pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program dan mempermudah aktivitas program pemerintah. Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan program beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* dan Bantuan Tugas Akhir terdapat berbagai komponen yang dijalankan. Peran fasilitator pemerintah daerah ini sebagai penyedia anggaran untuk mendukung berlangsung nya program beasiswa, melihat juga program yang dijalankan yaitu beasiswa, menjadikan anggaran sebagai fasilitas utama yang harus dipersiapkan untuk keberhasilan program beasiswa ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan APBD kategori tinggi, pada program beasiswa ini anggaran yang diberikan sebesar 34,6 milyar untuk seluruh kategori beasiswa yaitu Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* dan Bantuan Tugas

Akhir, selama berjalannya program beasiswa penyediaan anggaran sebagai fasilitas utama dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya dalam pelaksanaan program beasiswa ini harus melewati proses seleksi administrasi untuk melihat siapa yang berhak mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang ada. Dalam pelaksanaan proses administrasi dibutuhkan sistem atau tatanan yang baik untuk penyeleksian administrasi yang efektif efisien. Mengenai informasi pendaftaran dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mengikuti program beasiswa ini sudah disampaikan serta diketahui dengan baik oleh peserta program beasiswa. Alur administrasi selama program beasiswa ini dilaksanakan, juga diketahui oleh seluruh peserta dengan baik, namun dari wawancara yang penulis lakukan serta temuan dilapangan, dalam proses seleksi administrasi yang diberlakukan pada program ini, seluruhnya masih dikumpulkan secara fisik dan prosesnya masih manual tidak ada proses digital. Dimulai dari proses pendaftaran, pengumpulan persyaratan administrasi dan penyeleksian berkas yang dikumpulkan semua masih secara manual, sistem ini jika dilihat dari efektif efisien nya masih sangat jauh, terutama pada era sekarang ini semua kebutuhan dan keperluan dipermudah melalui digitalisasi. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* dan Bantuan Tugas Akhir, peran fasilitator telah dilaksanakan akan tetapi tidak optimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis penelitian pada peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal melalui Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* Dan Bantuan Tugas Akhir, dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada analisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal menggunakan teori peran pemerintah daerah. Yang dimana peran pemerintah daerah ada tiga yakni peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator. Dalam praktik pelaksanaan peran pemerintah daerah belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti memiliki beberapa rekomendasi saran agar peran pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Perdesa Beasiswa *Scientist* Dan Bantuan Tugas Akhir, dapat berjalan optimal untuk pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien dan akuntabelkedepannya. Saran- saran tersebut meliputi:

### **Peran regulator**

- a. Pengawasan yang dilaksanakan bisa diperketat lagi terutama pada persyaratan berkas peserta program beasiswa, setiap persyaratan harus dicek keasliannya untuk menghindari kecurangan.
- b. Perbaiki regulasi terkait Persyaratan yang rawan digunakan sebagai penyalahgunaan salah satunya melalui Kartu Petani Mandiri, dan Kartu Pedagang Mandiri dapat dikaji dan dipertimbangkan ulang mengenai persyaratan beasiswa menggunakan kartu tersebut.

### **Peran Dinamisator**

- a. Mengadakan sosialisasi kepada pemerintah desa mengenai program beasiswa utamanya pada kategori sepuluh sarjana perdesa untuk lebih memaksimalkan kuota yang tersedia dan pemerintah desa dapat andil dalam program beasiswa ini.
- b. Pemerintah daerah dapat memberikan dorongan kepada penerima beasiswa yang telah lulus dalam studinya untuk berkontribusi kepada pembangunan di Kabupaten Bojonegoro
- c. Penambahan tim pelaksana dari kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan sosialisasi program beasiswa.

### **Peran fasilitator**

- a. Pemerintah melakukan digitalisasi sistem pendaftaran dan pengumpulan berkas agar lebih efektif efisien, jika kerjasama yang dilakukan bersama instansi pemerintah tidak berjalan bisa mencari vendor swasta yang profesional sehingga dapat menunjang program beasiswa.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama untuk dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan ruang diskusi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, selanjutnya kepada dosen penguji yang telah memberikan saran serta masukannya terhadap penelitian ini. Tidak lupa ucapan terimakasih disampaikan penulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan dan akses peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Ajiwasesa Harumeka, H. M. (2025). *Indeks pembangunan manusia*. Badan Pusat Statistik.
- Alfajri, G. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani di Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 94–102.
- Arif Setiawan, P. T. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Atmaja, I. K. (2020). *Instrumen penelitian*. Mahameru Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka partisipasi sekolah*. Badan Pusat Statistik.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot? Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Program beasiswa*. <https://dinaspendidikan.bojonegorokab.go.id/menu/detail/28/programbeasiswa>
- Ding, N., & P. S. (2023). The economies' ability to produce diversified and complex products. *Sustainability*.
- Dodi Ilham, M. R. (2023). The government's role in encouraging the quality of education services in Indonesia. *Palangga Praja*.
- Eprilianto, E. F. (2023). Analisis peran stakeholders daerah dalam pengembangan city branding "Lamongan Megilan". *Publika*, 11(2), 1849–1862. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1849-1862>
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <https://doi.org/10.30588/jmp.v5i2.164>
- Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. *Academy of Management Journal*, 38(3), 635–672. <https://doi.org/10.2307/256741>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.mkri.id>
- Iyas, Y. (2014, May). Peran dan fungsi pemerintahan. <https://iyyasyusuf.blogspot.com/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>
- Josua Adrio Sihombing, R. H. (2024). Analisis peran pemerintah sebagai salah satu aktor penggerak ekonomi kreatif di Sumatera Utara. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 804–811. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.200>
- Ma'ruf, P. F. (2025). Analisis peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri (Studi kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan). *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 598–614.
- Refandi, A. D. (2025). Implementasi program beasiswa sepuluh sarjana per desa. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur:*

- Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23.  
<https://doi.org/10.30588/jmp.v5i1.142>
- Sari, V. K. (2022). The role of education towards economic growth: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Smith, A. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Sonia Ilie, P. R. (2021). Understanding higher education access: Inequalities and early learning in low- and middle-income countries. *British Educational Research Journal*.  
<https://doi.org/10.1002/berj.3723>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021–2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP.